

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Industri minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas industri yang sangat strategis, karena berhubungan dengan sektor pertanian (*agro-based industry*) yang banyak sekali berkembang cukup baik di negara-negara yang mempunyai iklim yang tropis seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Hasil industri dari komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) bukan hanya sekedar minyak goreng saja, akan tetapi juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk kebutuhan sehari-hari dalam masyarakat dan juga dapat digunakan sebagai bahan dasar industri lainnya seperti makanan, kosmetika, sabun, bahan bakar dan bahan kimia.

Proses perkembangan komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) saat ini telah berkembang sangat pesat, dimana terjadi peningkatan jumlah produksi kelapa sawit seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Dengan besarnya produksi yang mampu dihasilkan, tentunya hal ini telah memiliki dampak yang sangat positif bagi perekonomian serta pembangunan di Indonesia, baik dari segi kontribusinya terhadap pendapatan kas negara, maupun munculnya besarnya permintaan tenaga kerja yang terserap disektor kelapa sawit, sektor ini juga mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit. Dimana presentase penduduk miskin nasional berada diangka yang cukup tinggi. Boleh dibilang, industri minyak kelapa sawit ini dapat diharapkan menjadi pionir pertumbuhan perekonomian nasional.

Dengan melihat perkembangan perdagangan *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia dan Pakistan yang belum terlalu optimal, perlu diupayakan kegiatan promosi yang terus menerus untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di pasar Pakistan. Pakistan sendiri merupakan salah satu negara dengan konsumsi CPO terbesar di Asia Selatan setelah India, dimana pada saat ini Indonesia telah menguasai ekspor CPO ke India, sementara ekspor CPO ke Pakistan sempat dikuasai oleh Malaysia, dimana Malaysia muncul sebagai

negara pesaing CPO Indonesia. Dalam mengatasi hambatan ekspor CPO, sangat dibutuhkan peran antar pemerintah yang bersangkutan, hal ini lah yang pada akhirnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke Pakistan, khususnya ekspor non migas-nya yaitu *Crude Palm Oil* (CPO). Hambatan tarif ini lah yang membuat Indonesia memutuskan untuk bergerak cepat melakukan system preferensi perdagangan dengan Pakistan.

Akhirnya pada tanggal 16 Febuari 2012, Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan telah melaksanakanperjamuan makan malam dalam rangka mensyukuri atas telah ditanda tanganinya *Preferential Trade Agreement* (PTA) Indonesia-Pakistan di Jakarta pada tanggal 3 Febuari 2012 bertempat di Aula Budaya Nusantara KBRI Islamabad. Dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan preferensial dengan Pakistan berarti menandakan Indonesia telah mampu untuk turut serta dalam hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian tersebut, komoditas unggulan Indonesia yaitu CPO mendapat penurunan tarif bea masuk hingga setara dengan fasilitas yang diberikan oleh Pakistan terhadap Malaysia sebagai negara pesaing CPO Indonesia memiliki keringanan bea masuk ekspor CPO ke Pakistan.

Selain ingin dari mengurangi ketergantungan GSP yang datang dari negara maju, dapat disimpulkan bahwa penandatanganan *Preferential Trade Agreement* (PTA) Indonesia dengan Pakistan dikarenakan banyaknya kesamaan yang dimiliki oleh kedua negara, sehingga mempermudah dalam meningkatkan kerjasama, adanya peluang dalam peningkatan ekspor-ekspor unggulan lainnya, produk-produk dari Indonesia dapat bersaing dengan negara lain baik di Pakistan, Indonesia sendiri pun dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara khususnya dalam sektor ekonomi dan juga tentunya sebagai akses untuk menuju bentuk perdagangan yang lebih luas diantara kedua negara, yaitu perdagangan bebas (*free trade*).

Pembangunan kelapa sawit merupakan salah satu bagian dari pembangunan perkebunan dan industri pengolahan pertanian nasional. Sasaran pembangunan kelapa sawit merupakan bagian dari sasaran makro pembangunan perkebunan dan industri pengolahan pertanian. Pada level industri pengolahan minyak sawit, visi yang ditetapkan adalah pengembangan industri CPO dan pengembangan industri

turunannya untuk menjadi peningkatan nilai tambah melalui pendekatan klaster. Saat ini, strategi dan kebijakan pembangunan kelapa sawit tertuang dalam *Road Map Minyak Kelapa Sawit*.

Pendapatan petani dari kelapa sawit rata-rata mencapai empat juta per bulan per hektar, ini merupakan keunggulan ekonomis komoditas ini dibandingkan komoditas lain, Keunggulan semacam inilah, kata dia, yang menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Ini harus tetap kita jaga, agar terjadi perimbangan luas lahan dengan tanaman pertanian lain, atau pengembangan kelapa sawit hanya dilakukan di wilayah-wilayah yang benar-benar potensial untuk komoditas ini.

Industri kelapa sawit berpotensi menghasilkan perkembangan ekonomi dan sosial yang signifikan di Indonesia. Kelapa sawit merupakan produk pertanian paling sukses kedua di Indonesia setelah padi, dan merupakan ekspor pertanian terbesar. Industri ini menjadi sarana meraih nafkah dan perkembangan ekonomi bagi sejumlah besar masyarakat miskin di pedesaan Indonesia. Industri kelapa sawit Indonesia diperkirakan akan terus berkembang pesat dalam jangka menengah; tetapi, daya saingnya akan terpukul oleh agenda antiminyak sawit. Pasar minyak sawit dunia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir dengan produksi minyak sawit saat ini diperkirakan lebih dari 45 juta ton. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, dengan produksi lebih dari 18 juta ton minyak sawit per tahun.

Dengan lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan—dan lebih dari 20 persen di antaranya hidup di bawah garis kemiskinan—industri kelapa sawit menyediakan sarana pengentasan kemiskinan yang tidak terbandingi. Pembatasan konversi hutan untuk pertanian atau kelapa sawit menutup peluang peningkatan standar hidup dan manfaat ekonomi yang cukup prospektif bagi warga pedesaan, membenamkan mereka ke standar kehidupan yang kian rendah.

IV.2 Saran

Saran yang akan penulis berikan terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya-nya untuk mengoptimalkan ekspor komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan intensitas promosi dan advokasi yang terintegrasi dalam menghadapi kampanye negative terhadap kelapa sawit, antara lain melalui kegiatan *Green Campaign* ke negara-negara konsumen kelapa sawit Indonesia yang bertujuan untuk meluruskan berbagai persepsi yang salah terhadap kelapa sawit.
- b. Bentuk dari kegiatan ini adalah workshop, seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan promosi dan advokasi yang lain dengan melibatkan seluruh stakeholder perkelapasawitan nasional bersama dengan perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- c. Menggunakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai alat produksi, advokasi dan kampanye public untuk memperkuat posisi tawar kelapa sawit di Indonesia.
- d. Penguatan penelitian dan pengembangan kelapa sawit melalui peningkatan penelitian dan pengembangan antara pemerintah swasta dan lembaga penelitian termasuk melibatkan perguruan tinggi serta mempublikasikan penelitian tersebut dalam jurnal dan media asing.
- e. Melibatkan media komunikasi cetak maupun elektronik dalam advokasi dan promosi minyak kelapa sawit Indonesia terutama yang ada di negara-negara yang akan menjadi tujuan ekspor minyak sawit Indonesia dan tentunya melalui jalur diplomasi, forum bisnis, dan forum pertemuan ilmiah.
- f. Pihak pengusaha dan petani harus punya perjanjian yang jelas sejak awal, manfaat apa yang akan diterima petani, berapa lama waktunya, tanggung jawab sosial seperti apa yang harus dipenuhi pengusaha, dan pemerintah harus mengawasi itu, jangan dibiarkan petaninya begitu saja, menjalin komunikasi dengan pengusaha dan petani, mengawasi dan mengawal proses kemitraan antara pengusaha dan petani, karena tanpa dukungan dan mediasi pemerintah, maka pihak petani sangat rawan dirugikan.

- g. Adanya peran aktif pemerintah dalam mengawasi perjanjian yang telah dibentuk dengan Pakistan yaitu *Preferential Trade Agreement* (PTA) agar dikemudian hari tidak terjadi lagi indikasi kecurangan yang nantinya akan merugikan perekonomian Indonesia dan juga menciptakan suasana tegang antara pihak yang menjalin kerjasama yaitu Pakistan.
- h. Perlu dibentuknya suatu badan pemerintahan yang focus hanya menangani masalah perkelapa sawitan, jangan dipecah menjadi sub badan yang dari satu kementerian ke kementerian yang lain yang akhirnya akan memperlambat negosiasi dalam pengambilan keputusan terkait ketimpangan tari lagi.

